



REKONSILIASI POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA

Debora Sanur L*)

Abstrak

Situasi sosial politik di Indonesia saat ini sedang rentan akibat menguatnya politik Identitas dalam masyarakat. Politik identitas telah menyebabkan meningkatnya aksi intoleransi dalam masyarakat. Terutama saat berlangsungnya pemilu maupun pilkada di Indonesia. Kebinekaan dan keberagaman ras, suku, adat, dan agama yang sejak dulu menjadi identitas bangsa Indonesia menjadi terancam akibat politik identitas dan aksi intoleransi. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia membutuhkan rekonsiliasi agar konflik yang ditimbulkan oleh politik identitas tidak semakin besar dan memicu disintegrasi bangsa. Dalam hal ini peran setiap pihak sangat diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi. Penting bagi setiap elemen bangsa untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi bertujuan untuk mencegah kecenderungan dalam menggunakan identitas keagamaan, identitas rasial, atau kesukuan yang semakin berkembang secara masif dan menimbulkan perpecahan bangsa.

Pendahuluan

Tokoh agama memiliki peran yang besar dalam menangani konflik antargolongan. Oleh sebab itu, pada hari Selasa 16 Mei 2017 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan para Ulama dan beberapa tokoh lintas agama. Pertemuan tersebut merupakan salah satu upaya Presiden dalam merespons situasi yang kurang harmonis dalam masyarakat belakangan ini akibat meluasnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Presiden meminta agar para tokoh agama menyampaikan imbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk menghentikan konflik yang dapat menciptakan kondisi tidak kondusif di Indonesia.

Situasi sosial politik di Indonesia saat ini sedang rentan dengan isu SARA. Perbedaan yang tadinya saling melengkapi menjadi saling berhadapan. Kebinekaan dan keberagaman ras, suku, adat, dan agama yang sejak dulu menjadi identitas bangsa Indonesia menjadi terancam. Keadaan ini menguat sejak kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga berlanjut pada peristiwa demonstrasi saat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara maupun penolakan terhadap Gubernur Kalimantan Barat Cornelis saat mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan Ke-15 di Aceh. Penolakan terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

*) Peneliti Muda Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: debora.sanur@dpr.go.id



terjadi akibat masyarakat pendemo menilai bahwa beliau adalah sosok anti toleransi, sementara penolakan terhadap Gubernur Cornelis seolah merupakan tindakan balasan karena sehari sebelumnya pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ditolak kehadirannya di Pontianak, Kalimantan Barat.

Bagi Indonesia politik identitas dengan menggunakan isu SARA memang potensial untuk menimbulkan konflik dan perpecahan. Masih kuatnya rasa kedaerahan, primordialisme serta rendahnya toleransi tentu harus segera diatasi untuk mencegah disintegrasi bangsa. Terlebih mengingat Indonesia memiliki 17.000 pulau, 714 suku, serta 1.100 bahasa lokal, keberagaman yang dimiliki Indonesia seharusnya dipandang sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat perlu menyingkirkan konsep politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila tidak, politik identitas dapat menjadi ancaman bagi integritas dan pluralisme bangsa di masa depan. Dalam hal ini rekonsiliasi akibat konflik identitas juga perlu dilakukan dengan dukungan dari berbagai elemen bangsa.

Politik Identitas

Menurut Kauffman (dalam Maarif, 2012: 4) politik identitas bermula dari adanya kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa tersingkir oleh dominasi kelompok lainnya di dalam sebuah bangsa atau negara. Contoh seperti yang terjadi di Amerika Serikat, di mana praktik pembedaan kelompok masyarakat telah membangun kesadaran golongan yang merasa terpinggirkan seperti masyarakat kulit hitam, dan etnis-etnis lainnya melawan golongan masyarakat kulit putih.

Berdasarkan hal tersebut politik identitas didefinisikan sebagai politik yang digunakan dalam membedakan. Politik identitas menjadi sebuah penegasan terhadap batas untuk menentukan siapa yang disertakan dan siapa yang ditolak. Hal ini membuat status keanggotaan antara seorang anggota dan orang lain yang bukan anggota menjadi jelas dan bersifat permanen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agnes Heller (Ubed Abdillah, 2002: 22) yang menilai bahwa politik identitas adalah strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan sebagai kategori utamanya. Menurutnya politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis.

Di Indonesia, konsep politik identitas semakin menguat terutama saat adanya kontestasi politik. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M. Imdadun Rahmat mengatakan bahwa dewasa ini ada peningkatan yang signifikan terkait kasus intoleransi akibat pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ia menyatakan bahwa pada tahun 2015 Komnas HAM menerima sejumlah 87 laporan dan meningkat menjadi 97 laporan pada tahun 2016. Sementara itu pada tahun 2017, aksi intoleransi semakin meningkat terutama semenjak masa kampanye pilkada DKI Jakarta berlangsung.

Aksi intoleransi yang cenderung meningkat saat berlangsungnya Pemilu maupun Pilkada terjadi karena politik identitas yang membeda-bedakan keanggotaan masyarakat juga cenderung menguat. Masyarakat akhirnya rentan menjadi sarana dalam perebutan kekuasaan politik dalam kepentingan politik praktis. Menurut Buchari (dalam Buchari, 2014: 27), konsep identitas merupakan tindakan yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain dan dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial hingga memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut. Kondisi ini akhirnya membuat kemajemukan tidak lagi sebagai ikatan dalam persatuan dan kesatuan.

Dalam kontestasi politik, setiap orang dapat terlegitimasi untuk melakukan pembedaan SARA sesuai kepentingan maupun pandangan politiknya. Perbedaan SARA yang selama ini merupakan bentuk pluralisme yang berhasil dirangkul oleh toleransi menjadi berbalik dan membuat masyarakat aktif dalam melakukan politik balas dendam dengan sentimen identitas. Kontestasi Politik akhirnya membuat perbedaan SARA semakin terlihat. Masyarakat yang majemuk dengan kesadaran telah mengkotak-kotakkan dirinya sesuai dengan persamaan SARA dalam menentukan pilihan politiknya.

Selain itu, bentuk ekstrem politik identitas juga dapat membawa gagasan tentang separatisme. Hal tersebut dapat terjadi bila gerakan politik identitas terus menguat dalam masyarakat. Seperti terjadinya gerakan Minahasa Merdeka yang ramai dibicarakan di media sosial belakangan ini. Walau Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai bahwa deklarasi merdeka warga Minahasa hanya emosi spontanitas, namun hal tersebut tentu

tidak dapat didiamkan begitu saja karena dapat membawa potensi perpecahan bangsa. Demikian pula, dengan ditemukannya spanduk dan poster yang bertuliskan 'Garuda Ku Kafir' di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, di mana penyebaran poster dan spanduk tersebut dilakukan oleh oknum dan bukan merupakan kegiatan resmi mahasiswa maupun Civitas Akademika, namun keberadaannya juga membawa potensi disintegrasi bangsa.

Salah satu contoh efek dari politik identitas yang memecah belah bangsa diungkapkan oleh Presiden Afganistan, Ashraf Ghani, kepada Presiden Joko Widodo di mana Afganistan sejatinya merupakan negara kaya dan memiliki kekayaan tambang emas, gas, serta minyak yang luar biasa, namun akibat terjadinya pertikaian membuat negara tersebut sudah sangat sulit sekali untuk dirukunkan kembali. Kerukunan sulit tercipta kembali karena pertikaian tersebut yang awalnya terjadi akibat konflik dari 2 kelompok, saat ini telah berkembang menjadi 40 kelompok.

Oleh karena itu, penting bagi setiap elemen bangsa untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan agar konflik tidak meluas di Indonesia. Baik elite politik maupun masyarakat perlu untuk kembali memulihkan suasana yang sempat tercederai akibat menguatnya politik identitas di masyarakat. Terutama, terkait politik identitas yang masih berkelanjutan dan banyak terjadi baik di dunia maya melalui media sosial dan situs *online* maupun diskriminasi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Kehadiran politik identitas melalui isu SARA tersebut perlu diatasi dan diantisipasi agar tidak terjadi kembali pada Pilkada Serentak yang akan digelar pada tahun 2018 maupun pada Pemilu 2019.

Rekonsiliasi Bangsa

Berdasarkan hal tersebut di atas, bangsa Indonesia membutuhkan rekonsiliasi agar perpecahan yang ditimbulkan oleh politik identitas tidak semakin bertambah parah dan memicu perpecahan bangsa. Menurut Fahrenholz (dalam Geiko Muller-Fahrenholz, 2005: 123-132) rekonsiliasi merupakan tindakan yang berfokus pada cara untuk membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat konflik, sehingga dalam rekonsiliasi harus ada sikap saling memaafkan baik dari pihak korban maupun pelaku penindasan.

Munculnya banyak pendapat yang berbeda dari para tokoh terutama saat kontestasi politik telah membuat masyarakat cenderung hanya menyukai pendapat yang sesuai dengan kepentingan dan identitasnya saja. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan rekonsiliasi terutama pasca Pilkada DKI Jakarta 2017, peran para pemuka agama, tokoh masyarakat, maupun tokoh politik sangat diperlukan untuk menanggulangi politik identitas demi persatuan bangsa. Hal ini karena rekonsiliasi tidak hanya mempertemukan pihak yang saling benci, namun rekonsiliasi adalah suatu tempat yang di dalamnya mengandung kebenaran (*truth*), sifat welas asih manusia (*mercy*), keadilan (*justice*), maupun damai (*peace*). (John Paul Lederach, 1999: 29).

Selain itu, rekonsiliasi juga selalu membutuhkan suatu cara pandang untuk dapat melihat permasalahan utama yang ada, wacana yang berkembang, maupun usaha-usaha yang telah ada, agar dapat menemukan suatu inovasi baru dalam upaya rekonsiliasi. Seperti halnya yang terjadi pasca kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta 2017, salah satu tindakan rekonsiliasi yang dilakukan oleh masyarakat muncul dalam kegiatan 1000 lilin serta nyanyian lagu kebangsaan di gedung kantor Gubernur DKI Jakarta. Gerakan ini merupakan salah satu contoh gerakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk merajut kembali semangat pluralisme yang sempat terkoyak dalam kontestasi pilkada di DKI Jakarta. Namun demikian, tindakan tersebut tidak cukup bila tidak didukung oleh adanya peran serta tokoh masyarakat maupun pemerintah serta DPR RI.

Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran masyarakat dan setiap elemen bangsa agar tidak terprovokasi dalam benturan identitas, sehingga, masyarakat dapat kembali ke konsensus identitas Pancasila dan mampu menerima setiap perbedaan yang ada. Selanjutnya, rekonsiliasi tersebut harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini penting karena rekonsiliasi akan membuat setiap pihak dalam bangsa ini mampu memahami bahwa keragaman dan perbedaan merupakan kenyataan bangsa sekaligus menjadi penggerak agar setiap pihak tetap maju bergerak ke depan. Dalam masyarakat yang terpecah akibat konflik maupun pertikaian, rekonsiliasi adalah suatu keharusan yang mutlak dilakukan untuk menuju masa depan yang damai. (John Paul Lederach, 1999: 23).

Penutup

Politik Identitas yang cenderung menguat belakangan ini perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Keberagaman dan sikap toleransi yang dulu dianggap sebagai salah satu kekuatan, dengan adanya politik identitas justru ditanggapi sebagai keberpihakan pada yang berseberangan pemikiran. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perencanaan dari negara dalam meredakan maraknya politik identitas dengan melakukan rekonsiliasi.

Perdamaian melalui rekonsiliasi selalu membutuhkan upaya-upaya kreatif yang inovatif dalam memulihkan dan mengembangkan relasional antarpihak yang bertikai. Dalam hal ini peran setiap pihak untuk terlibat dalam rekonsiliasi bangsa sangat diperlukan. Salah satunya ialah peran dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini karena pendapat para tokoh tersebut memiliki peranan yang besar dalam pembentukan pola pikir masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah serta DPR RI juga merupakan pihak penting dalam menumbuhkan semangat nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena masyarakat memerlukan pemahaman yang benar atas konsep-konsep yang menjadi identitas budaya dan bangsa. Pemerintah perlu untuk terus menciptakan rekonsiliasi di tingkat tokoh masyarakat serta melakukan penegakan hukum yang tegas untuk mengembalikan pemahaman masyarakat terhadap dasar negara.

DPR RI melalui fungsinya dapat menanggulangi menguatnya politik identitas dalam negara melalui fungsi pengawasan dan legislasi. Melalui fungsi pengawasan DPR RI perlu untuk terus aktif dalam mendukung pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi nasional dan mencegah semakin maraknya politik identitas. Sedangkan melalui fungsi legislasi, keberadaan RUU yang menguatkan wawasan kebangsaan yaitu RUU Wawasan Nusantara perlu untuk segera diundangkan, agar masyarakat dapat kembali memahami nilai-nilai kebangsaan dalam menjaga toleransi dalam masyarakat. Diharapkan regulasi mengenai wawasan nusantara dan kebangsaan dapat menumbuhkan kembali sikap dasar bangsa yaitu saling mengalah untuk kepentingan bangsa yang jauh lebih besar, agar perbedaan tidak melebar pada disintegrasi bangsa.

Referensi

- Ahmad Syafii Maarif. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- Geiko Muller dan Fahrenholz. (2005). *Rekonsiliasi Upaya Memcah Spiral Kekerasan dalam Masyarakat*. Maumere: Ledalero.
- “Isu SARA Dikhawatirkan Merembet ke Pilkada Serentak 2018”, <https://news.detik.com/berita/d-3497854/isu-sara-dikhawatirkan-merembet-ke-pilkada-serentak-2018>, diakses 17 Mei 2017.
- James G. Kellas. (1998). *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. USA: St. Martin's Press.
- John Paul Lederach. (1999). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Liverpool: Library of British Council.
- “Jokowi Jangan Biarkan 250 Juta Penduduk Berantem Karena 1000 Orang”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/23/14583641/jokowi.jangan.biarkan.250.juta.penduduk.berantem.karena.1000.orang>, diakses 23 Mei 2017.
- “Kapolri akan Cegah Deklarasi Gerakan Minahasa Merdeka”, <https://news.detik.com/berita/d-3501810/kapolri-akan-cegah-deklarasi-gerakan-minahasa-merdeka>, diakses 17 Mei 2017.
- “Kedepankan Persatuan”, <http://mediaindonesia.com/news/read/104859/kedepankan-persatuan/2017-05-16>, diakses 17 Mei 2017.
- “Pancasila Titik Temu Perdebatan Ideologi”, <http://mediaindonesia.com/news/read/104487/pancasila-titik-temu-perdebatan-ideologi/2017-05-12>, diakses 17 Mei 2017.
- “Presiden: Kita Ini Bersaudara”, <http://www.antaranews.com/berita/629461/presiden-kita-ini-bersaudara>, diakses 17 Mei 2017.
- Sri Astuti Buchari. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas*. Jakarta: YOI.
- Ubed Abdillah. (2002). *Politik Identitas Etnis*. Magelang: IndonesiaTera.
- “Undip Semarang Dihebohkan Penyebaran Poster Garuda ku Kafir”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/undip-semarang-dihebohkan-penyebaran-poster-garuda-ku-kafir.html>, diakses 17 Mei 2017.
- “Wujudkan Rekonsiliasi”, <http://mediaindonesia.com/news/read/104719/wujudkan-rekonsiliasi/2017-05-15>, diakses 17 Mei 2017.